

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Penulis UI  
TEMA : Jebakan Kota di Jakarta  
SURAT KABAR/MAJALAH : Koran Tempo

Hari Jumat Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 14 Kol 1 – 2

## RINGKASAN

Adrianus Meliala, Guru Besar FISIP UI menulis tentang jebakan kota (*city trap*) telah membuat kita tidak bisa lari dari “ketidaktertiban” yang kini telah demikian beragam, misalnya kemacetan dan banjir musiman. Setiap kota, seperti halnya Jakarta, memiliki daya tahan dan daya dukung tertentu. Tapi entah kenapa, tampaknya kita tidak memiliki pilihan lain selain membanjirinya dengan berbagai masalah yang sulit terpecahkan.

## CATATAN:

# Jebakan Kota di Jakarta

**Adrianus Meliala**

GURU BESAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

Jebakan kota (*city trap*) telah membuat kita tidak bisa lari dari “ketidaktertiban” yang kini telah demikian beragam. Kita tahu bahwa setiap kota, seperti halnya Jakarta, memiliki daya tahan dan daya dukung tertentu. Tapi, entah kenapa, tampaknya kita tidak memiliki pilihan lain selain membanjirinya dengan berbagai masalah. Sebutlah, misalnya, kemacetan yang kini semakin tidak jelas mana ujung dan mana pangkal persoalan. Lalu kepadatan penduduk di berbagai wilayah kota, kemiskinan yang tumpah hingga ke jalan raya, banjir musiman, sektor informal yang selalu antiregulasi, serta berbagai jenis kriminalitas yang mudah sekali muncul dan kerap sulit terpecahkan.

Di pihak lain, program strategis penciptaan kota-kota alternatif, dengan fungsi-fungsi tidak sekompleks Jakarta, nyatanya kurang berhasil. Cerita bisa berbeda andaikan proyek “memindahkan” Jakarta ke beberapa wilayah kosong di Jawa Barat dapat dilakukan.

Pertanyaan besar yang kemudian selalu dihadapi oleh pemerintah daerah di DKI adalah apakah terdapat berbagai opsi untuk menghadapi jebakan kota tersebut? Pemikiran ini diperlukan agar jangan sampai semua jenis ketidaktertiban berkembang secara bersamaan dan tak terkendali. Terkait dengan sumber daya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang konon amat besar, sangat diharapkan itu menjadikan pemda mampu mengambil alih dan mengendalikan perkembangan kota. Bukan sebaliknya.

Sebagai contoh, walau kemacetan sulit ditanggulangi, tidak demikian dengan kriminalitas atau perilaku sektor informal yang habis ditumpas. Ini pilihan yang banyak diambil kota-kota di Eropa. Contoh lain, menyadari bahwa kota merupakan tumpuan hidup banyak orang, maka ketidaktertiban dalam bentuk keberadaan sektor informal yang tak terkendali seakan diperbolehkan. Demikian pula dengan kehadiran masyarakat miskin di tengah kota yang diharapkan berfungsi menopang sektor formal dan modern. Inilah pilihan banyak kota di Asia.

### Pengebuk

Jika ada kesalahan paling besar dari para perancang, pengembang, dan pembangun Jakarta di waktu-waktu terdahulu, yakni tidak pernah menghitung ketidaktertiban sebagai jebakan yang pasti muncul dan sekali muncul lalu sukar untuk keluar. Kalaupun perhitungan itu ada, kemungkinan besar aparat pemerintah DKI tidak pernah membayangkan bahwa, misalnya, banjir akan terjadi sebesar yang

dialami Jakarta pada 2004 dan 2007, migrasi ke Jakarta mencapai seperempat juta orang per tahun, dan kemacetan akan membuat jalan-jalan di Jakarta berhenti total sekitar 10 tahun lagi.

Tapi, seperti halnya bayang-bayang, ketidaktertiban, teorinya bisa ditekan, dikendalikan, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Itu bisa terjadi kalau program untuk mengatasinya ternyata benar. Ada kecurigaan, pemerintah DKI memilih “penggebuk” yang salah untuk sesuatu yang disangka sebagai alat. Jadi, bayangkan, bukan hanya cara penyelesaian masalah yang tidak benar-benar diyakini ketepatannya, melainkan permasalahan yang sebenarnya pun belum tentu tepat diidentifikasi.

Ada beberapa contoh. Pendirian berbagai pusat belanja mewah, misalnya. Bagi penulis, sama sekali tidak jelas, apa ini langkah penyelesaian bagi masalah tertentu atau malah penciptaan masalah baru. Dewasa ini, saking banyaknya, berbagai mal diisi oleh *tenant* yang itu-itu saja dan kurang dikunjungi pengunjung. Dengan demikian, terpaksa lah antarmal terjadi situasi saling “membunuh”.

Contoh lain, ketidaksiplinan terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau, demikian pula terkait dengan kawasan resapan air. Dari waktu ke waktu, pemda melegitimasi ruang terbuka hijau yang semakin mengecil. Dan tampaknya baru sadar bahwa kecilnya kawasan hijau yang ada kini telah membawa masalah lingkungan baru. Terkait dengan kawasan resapan air, warga juga diketahui seakan berlomba tidak mematuminya, demikian pula aparat yang, tentu saja, juga menerima keuntungan dari perlombaan itu.

Contoh paling anyar adalah program *busway*. Sebagai suatu inisiatif, ini adalah kebijakan yang paling murah dan mudah, sekaligus bersifat terobosan gampang dibanding berbagai kebijakan yang bisa diambil terkait dengan transportasi di Jakarta. Masalahnya, saya amat ragu bahwa implikasi ketidaktertiban yang ditimbulkannya juga telah di-*assess* secara komprehensif sejak awal.

### Ketidaktertiban

Mengingat situasi dalam banyak hal sudah terlalu buruk, opsi terkait dengan ketidaktertiban sebagaimana disebut di atas tampaknya tinggal dua: hidup bersama dengan jebakan kota atau, yang kedua, sama sekali dikuasai olehnya. Sementara itu, pilihan ketiga, yakni situasi ketika Jakarta keluar sama sekali dari ketidaktertiban, jelas pilihan yang muskil. Mengapa demikian?

Mengingat tidak pernah diletakkannya



dimensi ketidaktertiban secara terperhitungkan (*calculated*), dewasa ini ketidaktertiban sudah menjadi melekat, menyatu dengan fenomena perkotaan itu sendiri. Maka tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Selain melibatkan begitu banyak orang, entah yang hidup dari sektor informal, entah dari birokrasi, dari berbagai ketidaktertiban, dan juga dari kriminalitas kota, juga karena pada akhirnya akan melibatkan pemda sendiri sebagai perancang kota. Dalam hal ini, bukankah pemerintah DKI tidak mungkin menunjuk diri sendiri sebagai pihak yang bersalah?

Terkait dengan opsi bahwa Jakarta dapat dikuasai ketidaktertiban, harus dikatakan dengan nada pahit bahwa itulah yang tampaknya bakal terjadi. Kalau tidak ada upaya yang serius dan bersifat total, Jakarta akan benar-benar menjadi lahan ketidaktertiban ketimbang sebaliknya. Sebaliknya,

di berbagai bidang kegiatan, suasana yang terjadi adalah pemerintah DKI hanya mampu sekadar mengupayakan agar situasi tidak memburuk dan Jakarta tetap bertahan walau dikelilingi pengemis, kendaraan bermotor yang macet, air yang masuk dan tidak bisa keluar, sektor informal yang tidak mau diatur, serta pelaku kriminalitas yang merajai jalan-jalan di Jakarta.

Dengan demikian, perspektif perlu diubah bahwa jika ketidaktertiban tidak dapat dihilangkan, seyogyanya kita mencoba bisa hidup bekerja sama dan menyesuaikan diri dengannya. Dan, percaya atau tidak, justru hal itulah yang tengah terjadi, khususnya pada level individual.

Menyadari Jakarta yang macet, orang pergi kerja semakin pagi dan pulang semakin larut. Menyadari Jakarta semakin penuh tenaga kerja, orang mengandalkan hubungan-hubungan sosial informal untuk bisa diterima kerja. Menyadari institusi pengamanan formal sering kurang bisa diandalkan, orang beralih ke kelompok-kelompok pengamanan informal, dan seterusnya.

Model penyesuaian diri pada level individual itulah yang tampaknya perlu secara optimal dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di perkotaan, seperti Jakarta. Kepolisian, misalnya, sudah lama tidak bicara soal memberantas kejahatan, tapi sekadar mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar kriminalitas tidak berkembang terlalu tinggi alias terjaga. Pada saat-saat menjelang hari raya, sebagai contoh lain, pemerintah DKI tampaknya tidak terlalu kaku bagi kalangan sektor informal dalam rangka berdagang memenuhi kebutuhan kelas bawah kota.

Namun, guna dapat hidup "berdamai" dengan ketidaktertiban tersebut, perlu terdapat, katakanlah, beberapa aturan main sebagai berikut ini.

Pertama, perlu terdapat semacam konsensus di antara warga Jakarta bahwa ada saat dan tempat di mana keteraturan dan ketertiban dapat dinomorduakan. Kedua, perlu terdapat aturan main pula bahwa tidak semua orang dapat berlindung di balik "izin" terkait dengan ketidaktertiban tersebut. Satu contoh, tidak semua orang dapat tidak tertib terkait dengan penggunaan sirene dan petugas pembuka jalan. Juga tidak semua orang dapat menggunakan seragam ala militer atau menenteng senjata api ke sana-kemari. Bagi yang menyalahgunakan, penegakan hukum dapat dilakukan.

Ketiga, perlu pula disepakati bahwa terdapat unsur kesementaraan (*temporer*) di balik semua itu. Jika kesementaraan menjadi keajekan, jebakan ketidaktertiban akan betul-betul menjadi kenyataan. ●